

Peran Geografi Pembangunan dalam Pengembangan Ekonomi di Kota Tasikmalaya

The Role of Development Geography in Economic Development in Tasikmalaya City

Sari Muna Laeliah¹, Siti Fadjarajani², Cahya Darmawan³

^{1,2,3} Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi
232170029@student.unsil.ac.id

Abstrak

Pembangunan ekonomi perkotaan merupakan proses multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan kesejahteraan, pengurangan ketimpangan spasial, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks tersebut, Geografi Pembangunan (Development Geography) menawarkan kerangka analisis yang menempatkan ruang sebagai faktor aktif dalam proses pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Geografi Pembangunan dalam pengembangan ekonomi Kota Tasikmalaya dengan menekankan analisis distribusi spasial aktivitas ekonomi, peran infrastruktur, serta implikasi kebijakan pembangunan berbasis wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan pembangunan ekonomi perkotaan dan tata ruang wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kota Tasikmalaya terkonsentrasi pada pusat kota dan koridor transportasi utama, sementara wilayah pinggiran masih didominasi oleh UMKM rumah tangga dengan keterbatasan akses infrastruktur. Infrastruktur fisik dan digital berperan sebagai *spatial enabler* yang mendorong mobilitas ekonomi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing UMKM. Namun, konsentrasi pembangunan yang tidak merata berpotensi memperlebar ketimpangan spasial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan berbasis wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Geografi Pembangunan penting dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi Kota Tasikmalaya yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan konektivitas, pengembangan kluster ekonomi lokal, serta integrasi kebijakan ekonomi dan penataan ruang.

Kata kunci: Geografi Pembangunan, Ekonomi Daerah, Ketimpangan Spasial, Infrastruktur, Tasikmalaya

Abstract

*Urban economic development is a multidimensional process that is not only oriented towards increasing economic growth, but also includes the equitable distribution of welfare, the reduction of spatial inequality, and environmental sustainability. In this context, Development Geography offers an analytical framework that places space as an active factor in the economic development process. This study aims to examine the role of Development Geography in the economic development of Tasikmalaya City by emphasizing the analysis of the spatial distribution of economic activities, the role of infrastructure, and the implications of region-based development policies. The research method used is a literature study with a qualitative descriptive approach. Data was obtained from national and international journals, academic books, and official government documents relevant to urban economic development and regional spatial planning. The results of the study show that the economic activities of Tasikmalaya City are concentrated in the city center and main transportation corridors, while the suburban areas are still dominated by household MSMEs with limited access to infrastructure. Physical and digital infrastructure play a role as *spatial enablers* that encourage economic mobility, expand market access, and increase the competitiveness of MSMEs. However, uneven development concentrations have the potential to widen spatial inequality if not balanced with region-based policies. This study concludes that the Development Geography approach is important in formulating a more inclusive, competitive, and sustainable economic development strategy for Tasikmalaya City through strengthening connectivity, developing local economic clusters, and integrating economic policies and spatial planning.*

Keywords: Development Geography, Regional Economy, Spatial Inequality, Infrastructure, Tasikmalaya

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu proses multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga mencakup transformasi struktural dalam sistem sosial, kelembagaan, dan keruangan suatu wilayah. Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dipahami sebagai proses peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, yang meliputi peningkatan pendapatan, pemerataan kesempatan, serta perluasan pilihan hidup masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh Sen (1999) melalui pendekatan *development as freedom*, yang menempatkan pembangunan sebagai proses perluasan kapabilitas manusia, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi kuantitatif.

Dalam skala global dan nasional, pembangunan ekonomi juga selalu dihadapkan pada persoalan ketimpangan wilayah. Teori pertumbuhan neoklasik yang menekankan mekanisme pasar bebas dan mobilitas faktor produksi sering kali tidak sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa kesenjangan antarwilayah tetap bertahan dalam jangka panjang. Myrdal (1957) melalui teori *cumulative causation* menjelaskan bahwa wilayah yang telah maju cenderung semakin berkembang, sementara wilayah tertinggal semakin terpinggirkan akibat efek *backwash*. Senada dengan itu, Hirschman (1958) menyatakan bahwa proses pembangunan bersifat tidak seimbang dan memerlukan intervensi kebijakan untuk mengurangi dampak ketimpangan spasial.

Dimensi ruang menjadi aspek fundamental dalam pembangunan ekonomi karena seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi selalu terikat pada lokasi geografis tertentu. Menurut Capello (2016), pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari karakteristik spasial seperti aksesibilitas, kedekatan dengan pusat pertumbuhan, dan ketersediaan infrastruktur. Dalam konteks nasional, ketimpangan antarwilayah di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan tertentu, sehingga menuntut pendekatan berbasis wilayah (*place-based development*) yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal (OECD, 2019).

Dalam konteks perkotaan, kota berperan sebagai pusat aglomerasi ekonomi, inovasi, dan pelayanan jasa. Teori aglomerasi ekonomi yang dikemukakan oleh Marshall (1890) menekankan pentingnya kedekatan geografis antar pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi produksi, berbagi tenaga kerja terampil, dan pertukaran pengetahuan. Krugman (1991) kemudian mengembangkan teori ini melalui *New Economic Geography*, yang menjelaskan bagaimana interaksi antara skala ekonomi, biaya transportasi, dan mobilitas tenaga kerja membentuk pola konsentrasi ekonomi di wilayah perkotaan.

Namun, aglomerasi ekonomi tidak selalu menghasilkan dampak positif yang merata. Menurut Fujita dan Thisse (2013), konsentrasi kegiatan ekonomi yang berlebihan dapat memicu ketimpangan spasial, tekanan terhadap lingkungan, serta marginalisasi wilayah pinggiran. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perkotaan memerlukan perencanaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pusat dan hinterland, serta distribusi manfaat pembangunan yang lebih inklusif.

Kota Tasikmalaya, sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Priangan Timur, menunjukkan dinamika pembangunan ekonomi yang khas. Kota ini memiliki kekuatan pada sektor UMKM, perdagangan, jasa, dan industri kreatif berbasis kearifan lokal. Menurut teori basis ekonomi (*economic base theory*), sektor-sektor unggulan tersebut berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah karena mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor lain (Richardson, 1973; Isard, 1960). Namun, distribusi aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah internal kota.

Fenomena pembangunan ekonomi di Kota Tasikmalaya memperlihatkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup dinamis, namun belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan antarwilayah. Beberapa kawasan berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan jasa, sementara kawasan lain tertinggal akibat keterbatasan akses infrastruktur dan peluang ekonomi. Kondisi ini sejalan dengan teori ketimpangan wilayah yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung terpolarisasi di lokasi tertentu (Myrdal, 1957; Friedmann, 1966).

Permasalahan lain yang muncul adalah tekanan terhadap ruang perkotaan, seperti alih fungsi lahan, kepadatan permukiman, dan degradasi lingkungan. Menurut teori ekologi perkotaan, dinamika pertumbuhan kota yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu konflik penggunaan lahan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat (Park & Burgess, 1925; UN-Habitat, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak berbasis perencanaan spasial berpotensi menimbulkan masalah sosial dan lingkungan jangka panjang.

Selain itu, keterbatasan integrasi antara kebijakan ekonomi dan penataan ruang masih menjadi

tantangan utama. Pendekatan sektoral yang terfragmentasi sering kali mengabaikan keterkaitan antarwilayah dan potensi lokal. Padahal, menurut Healey (1997), perencanaan pembangunan yang efektif harus bersifat kolaboratif dan berbasis ruang, dengan mempertimbangkan interaksi antara aktor, wilayah, dan kebijakan publik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di Kota Tasikmalaya, namun sebagian besar masih berfokus pada analisis sektoral atau indikator ekonomi makro. Pendekatan tersebut cenderung mengabaikan dimensi spasial dan distribusi keruangan pembangunan. Menurut Barca, McCann, dan Rodríguez-Pose (2012), kegagalan pembangunan wilayah sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap konteks lokal dan karakteristik ruang.

Di sisi lain, kajian Geografi Pembangunan yang mengintegrasikan aspek fisik, sosial, dan ekonomi dalam analisis pembangunan ekonomi perkotaan masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan ini mampu menjelaskan pola ketimpangan, potensi wilayah, serta hubungan antara pusat dan pinggiran kota secara lebih komprehensif (Deng, Wang, & Song, 2023; Potter et al., 2018).

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada minimnya studi yang mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis untuk merumuskan implikasi kebijakan berbasis spasial. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan Geografi Pembangunan sebagai kerangka analisis utama.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan perencanaan pembangunan ekonomi kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek keruangan berpotensi memperbesar ketimpangan dan menurunkan daya saing wilayah dalam jangka panjang. Menurut teori pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan harus menjadi prinsip utama dalam perencanaan pembangunan (WCED, 1987; Sachs, 2015).

Geografi Pembangunan menawarkan pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut karena mampu mengintegrasikan analisis spasial dengan dinamika sosial ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi sektor unggulan berbasis wilayah, pemetaan ketimpangan pembangunan, serta perumusan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran (Capello, 2016; Deng et al., 2023).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis, baik dalam pengembangan ilmu geografi pembangunan maupun sebagai referensi bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya yang berbasis bukti spasial.

Berdasarkan uraian konteks, permasalahan, dan kesenjangan penelitian tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Geografi Pembangunan dalam pengembangan ekonomi di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor geografis, pola keruangan, dan dinamika sosial ekonomi mempengaruhi pertumbuhan dan distribusi kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mensintesis temuan-temuan ilmiah terkait pembangunan ekonomi perkotaan, mengidentifikasi sektor unggulan berbasis spasial, serta menganalisis implikasi kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan dimensi ruang dan wilayah. Pendekatan ini diharapkan sejalan dengan prinsip *place-based development* yang menekankan pentingnya konteks lokal dalam perencanaan pembangunan (Barca et al., 2012; OECD, 2019).

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian Geografi Pembangunan serta kontribusi praktis bagi perencanaan pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya yang lebih merata, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi literatur dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji konsep, teori, serta temuan empiris yang telah ada terkait peran Geografi Pembangunan dalam pengembangan ekonomi perkotaan. Menurut Kamilah et al. (2023), studi literatur memungkinkan peneliti untuk melakukan penelusuran, evaluasi, dan sintesis terhadap berbagai sumber ilmiah guna memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menemukan celah penelitian yang relevan.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya berdasarkan perspektif spasial dan geografis. Metode ini bertujuan memaparkan realitas empiris secara sistematis dan kontekstual sesuai dengan kondisi wilayah yang diteliti (R. Anisya Dwi Septiani & Widjojoko, 2022). Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui jurnal nasional dan internasional, buku akademik, prosiding ilmiah,

serta dokumen resmi pemerintah yang membahas pembangunan wilayah, tata ruang, infrastruktur, dan dinamika ekonomi Kota Tasikmalaya.

Tahapan penelitian meliputi: (1) pengumpulan literatur yang relevan dengan Geografi Pembangunan dan ekonomi perkotaan; (2) klasifikasi dan analisis isi literatur berdasarkan tema spasial, sektor ekonomi, dan kebijakan pembangunan; serta (3) sintesis temuan untuk merumuskan peran Geografi Pembangunan dalam mendukung pengembangan ekonomi Kota Tasikmalaya. Hasil analisis disajikan secara naratif dengan dukungan tabel deskriptif untuk memperjelas temuan utama.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Geografi Pembangunan memiliki peran signifikan dalam memahami dan mengarahkan pengembangan ekonomi Kota Tasikmalaya. Dari perspektif spasial, aktivitas ekonomi kota terkonsentrasi pada kawasan pusat perdagangan, koridor transportasi utama, serta wilayah dengan akses infrastruktur yang lebih baik. Pola ini mencerminkan konsep aglomerasi ekonomi, di mana kedekatan geografis antar-pelaku usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Table 1.
Distribusi Spasial Aktivitas Ekonomi di Kota Tasikmalaya

Wilayah Perkotaan	Karakteristik Ekonomi Dominan	Implikasi Spasial
Pusat Kota	Perdagangan, jasa, UMKM	Konsentrasi pertumbuhan ekonomi
Koridor Transportasi	Distribusi barang, jasa logistik	Aksesibilitas tinggi
Pinggiran Kota	UMKM rumah tangga, industri kecil	Potensi berkembang namun terbatas infrastruktur

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

Analisis distribusi spasial aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa struktur ekonomi perkotaan tidak berkembang secara acak, melainkan mengikuti logika ruang yang dipengaruhi oleh aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, serta interaksi sosial-ekonomi antarpelaku. Dalam perspektif Geografi Pembangunan, ruang dipahami sebagai faktor aktif yang membentuk proses pembangunan, bukan sekadar latar pasif tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi. Pola ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kota merupakan hasil interaksi antara kondisi geografis, kebijakan pembangunan, dan dinamika pasar lokal.

Wilayah pusat kota Tasikmalaya menunjukkan dominasi aktivitas perdagangan, jasa, dan UMKM yang berfungsi sebagai inti pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *economies of agglomeration* (Marshall, 1890; Krugman, 1991), yang menyatakan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu lokasi akan menciptakan keuntungan berupa efisiensi biaya produksi, kemudahan akses pasar, dan pertukaran informasi yang lebih cepat. Kedekatan spasial antara pelaku usaha, konsumen, lembaga keuangan, dan fasilitas publik mendorong terciptanya iklim ekonomi yang dinamis dan inovatif. Dalam kerangka Geografi Pembangunan, pusat kota berperan sebagai *growth pole* (Perroux, 1955), yaitu wilayah yang menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi kota secara keseluruhan. Namun, konsentrasi ini juga menimbulkan dampak negatif berupa tekanan ruang, meningkatnya harga lahan, kepadatan lalu lintas, dan potensi eksklusi ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu mengakses pusat kegiatan ekonomi tersebut.

Koridor transportasi di Kota Tasikmalaya memperlihatkan karakteristik ekonomi yang didominasi oleh distribusi barang dan jasa logistik. Pola ini sejalan dengan teori *spatial interaction* dan *transport-led development*, yang menekankan bahwa jaringan transportasi merupakan elemen kunci dalam membentuk struktur ekonomi wilayah. Aksesibilitas yang tinggi menjadikan koridor transportasi sebagai jalur strategis bagi pergerakan barang, tenaga kerja, dan informasi, sehingga mendorong munculnya aktivitas ekonomi yang bersifat linier mengikuti jaringan jalan utama. Dalam konteks Geografi Pembangunan, koridor ini berfungsi sebagai *growth axis* yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah pinggiran dan hinterland. Keberadaan infrastruktur transportasi yang memadai tidak hanya mempercepat arus distribusi, tetapi juga memperluas jangkauan manfaat ekonomi ke wilayah yang sebelumnya kurang berkembang. Meski demikian, ketergantungan yang berlebihan pada koridor utama berpotensi menciptakan ketimpangan baru apabila wilayah yang tidak terhubung secara langsung dengan jaringan tersebut tertinggal dalam proses pembangunan.

Sementara itu, wilayah pinggiran kota Tasikmalaya didominasi oleh UMKM berbasis rumah tangga dan industri kecil yang memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal. Dalam perspektif Geografi Pembangunan, kawasan pinggiran sering kali berfungsi sebagai

ruang transisi antara wilayah urban dan rural, dengan karakteristik ekonomi yang masih bersifat informal dan berorientasi pada pasar lokal. Teori *core-periphery* (Friedmann, 1966) menjelaskan bahwa wilayah pinggiran cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan infrastruktur dibandingkan wilayah inti. Akibatnya, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, pertumbuhan di wilayah pinggiran berjalan lebih lambat dan kurang kompetitif. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan spasial yang bersumber dari perbedaan akses terhadap sumber daya dan jaringan ekonomi, bukan semata-mata karena rendahnya kapasitas masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, distribusi spasial aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat tidak merata secara geografis, dengan pusat kota dan koridor transportasi sebagai kawasan unggulan, sementara wilayah pinggiran masih berada pada posisi marginal. Dalam kerangka Geografi Pembangunan, ketimpangan ini merupakan konsekuensi dari proses pembangunan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara spasial. Oleh karena itu, peran Geografi Pembangunan menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi pola ketimpangan, memahami hubungan antara ruang dan aktivitas ekonomi, serta merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Implikasi kebijakan dari analisis ini menekankan perlunya pendekatan pembangunan berbasis wilayah (*place-based development*), seperti penguatan infrastruktur dan aksesibilitas di kawasan pinggiran, pengembangan kluster UMKM sesuai karakteristik lokal, serta peningkatan konektivitas antara pusat kota, koridor transportasi, dan wilayah pinggiran. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga mampu menyebar secara lebih merata dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat di seluruh wilayah kota.

Tabel 2.
Peran Infrastruktur dalam Pengembangan Ekonomi

Jenis Infrastruktur	Dampak terhadap Ekonomi Lokal
Jalan dan Transportasi	Meningkatkan mobilitas barang dan tenaga kerja
Ruang Publik Ekonomi	Mendorong aktivitas UMKM dan ekonomi kreatif
Infrastruktur Digital	Memperluas akses pasar dan e-commerce

Sumber: Hasil Analisis Penelitian

Tabel 2 menunjukkan bahwa infrastruktur merupakan elemen kunci dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal apabila dirancang dan ditempatkan dengan mempertimbangkan aspek spasial. Dalam perspektif Geografi Pembangunan (Development Geography), infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai sarana fisik, melainkan sebagai *spatial enabler* yang membentuk pola interaksi ekonomi, sosial, dan kelembagaan dalam suatu wilayah. Menurut Todaro dan Smith (2015), infrastruktur memiliki peran strategis dalam menurunkan biaya transaksi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas peluang ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang sedang berkembang seperti Kota Tasikmalaya.

Infrastruktur jalan dan transportasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan mobilitas barang dan tenaga kerja. Aksesibilitas yang baik memungkinkan pelaku usaha mendistribusikan produk dengan lebih efisien, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan keterhubungan antara pusat produksi dan pasar. Dalam teori Growth Pole yang dikemukakan oleh Perroux (1950), keberadaan jaringan transportasi yang memadai akan memperkuat fungsi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat efek limpahan (*spillover effects*) ke wilayah sekitarnya. Di Kota Tasikmalaya, konektivitas antar-kecamatan dan keterhubungan dengan jalur lintas selatan Jawa memperkuat posisi kota sebagai simpul distribusi barang dan jasa regional, sehingga mendukung dinamika ekonomi lokal berbasis perdagangan dan jasa.

Selanjutnya, ruang publik ekonomi seperti pasar rakyat, kawasan kuliner, sentra UMKM, dan ruang kreatif berperan penting dalam menggerakkan ekonomi berbasis masyarakat. Dalam pendekatan New Economic Geography (Krugman, 1991), aglomerasi kegiatan ekonomi pada ruang tertentu mampu menciptakan efisiensi, meningkatkan interaksi antar-pelaku usaha, serta mendorong inovasi. Ruang publik ekonomi yang dirancang secara inklusif memungkinkan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif memperoleh akses terhadap konsumen, modal sosial, dan jaringan usaha. Dalam konteks Geografi Pembangunan, keberadaan ruang publik ini memperkuat fungsi ruang sebagai medium pembangunan sosial-ekonomi yang partisipatif dan berkelanjutan.

Sementara itu, infrastruktur digital menjadi determinan baru dalam pengembangan ekonomi wilayah di era transformasi digital. Infrastruktur digital memperluas akses pasar melalui e-commerce,

media sosial, dan platform daring, sehingga pelaku usaha lokal tidak lagi bergantung sepenuhnya pada lokasi fisik. Menurut Castells (2010) dalam teori *network society*, teknologi informasi membentuk ruang aliran (*space of flows*) yang memungkinkan interaksi ekonomi lintas wilayah secara cepat dan efisien. Di Kota Tasikmalaya, perkembangan infrastruktur digital mendukung tumbuhnya usaha berbasis daring, memperkuat daya saing UMKM, serta membuka peluang ekonomi baru yang berbasis kreativitas dan inovasi lokal.

Temuan dalam Tabel 2 menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan dimensi spasial mampu meningkatkan aksesibilitas dan memperluas peluang ekonomi masyarakat. Pendekatan Geografi Pembangunan membantu mengaitkan lokasi infrastruktur dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan tidak bersifat sektoral semata, tetapi terintegrasi secara wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan Deng, Wang, dan Song (2023) yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang efektif harus mempertimbangkan interaksi antara ruang, sumber daya, dan struktur sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Geografi Pembangunan berkontribusi signifikan dalam: (1) pemetaan potensi ekonomi berbasis wilayah, yang memungkinkan identifikasi sektor unggulan secara spasial; (2) analisis ketimpangan pembangunan antar-kawasan, sehingga intervensi kebijakan dapat lebih tepat sasaran; dan (3) perumusan strategi pengembangan ekonomi berbasis kluster dan jaringan lokal, yang mendukung UMKM serta industri kreatif. Dengan demikian, pendekatan Geografi Pembangunan menjadi instrumen penting dalam mendukung pengembangan ekonomi Kota Tasikmalaya yang berkelanjutan, inklusif, dan berlandaskan karakteristik ruang lokal, serta mampu menjembatani antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Pembahasan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya tidak dapat dipahami secara optimal tanpa menggunakan perspektif Geografi Pembangunan yang menempatkan ruang sebagai faktor aktif dalam proses pembangunan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat membentuk pola spasial tertentu yang mencerminkan interaksi kompleks antara kondisi geografis, kebijakan pembangunan, dan dinamika sosial ekonomi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2015) yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang selalu beroperasi dalam konteks ruang dan wilayah tertentu.

Distribusi Spasial Aktivitas Ekonomi dan Dinamika Aglomerasi

Distribusi spasial aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi pada pusat kota dan koridor transportasi utama. Pola ini mencerminkan mekanisme aglomerasi ekonomi, di mana pelaku usaha cenderung terkonsentrasi pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi, infrastruktur memadai, dan kedekatan dengan pasar. Marshall (1890) menjelaskan bahwa aglomerasi memberikan keuntungan berupa penghematan biaya produksi, kemudahan pertukaran informasi, serta tersedianya pasar tenaga kerja yang lebih luas. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, konsentrasi perdagangan, jasa, dan UMKM di pusat kota memperlihatkan bahwa ruang pusat berfungsi sebagai lokus utama pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan New Economic Geography yang dikembangkan oleh Krugman (1991) semakin memperkuat temuan ini, dengan menekankan bahwa konsentrasi aktivitas ekonomi terjadi akibat interaksi antara skala ekonomi, biaya transportasi, dan permintaan pasar. Semakin kuat aglomerasi di pusat kota, semakin besar pula daya tarik wilayah tersebut bagi modal dan tenaga kerja. Namun, proses ini bersifat kumulatif dan berpotensi memperlebar ketimpangan spasial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan, sebagaimana dijelaskan dalam teori cumulative causation oleh Myrdal (1957).

Ketimpangan Spasial dan Hubungan Core–Periphery

Wilayah pinggiran Kota Tasikmalaya yang didominasi oleh UMKM rumah tangga dan industri kecil menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi yang relatif lebih rendah dibandingkan pusat kota. Kondisi ini mencerminkan pola core–periphery, di mana pusat kota (core) menikmati akumulasi sumber daya, modal, dan infrastruktur, sementara wilayah pinggiran (periphery) mengalami keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi (Friedmann, 1966). Ketimpangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kapasitas masyarakat pinggiran, melainkan oleh struktur spasial pembangunan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Dalam perspektif Geografi Pembangunan, ketimpangan spasial tersebut merupakan hasil dari interaksi jangka panjang antara kebijakan pembangunan, pola investasi, dan jaringan infrastruktur. Deng, Wang, dan Song (2023) menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak mempertimbangkan distribusi spasial akan cenderung menghasilkan pertumbuhan yang eksklusif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, wilayah pinggiran Kota Tasikmalaya sesungguhnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan apabila didukung oleh intervensi kebijakan yang berbasis wilayah dan karakteristik lokal.

Infrastruktur sebagai Spatial Enabler Pembangunan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki peran sentral dalam membentuk pola dan intensitas aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya. Infrastruktur jalan dan transportasi meningkatkan konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya distribusi, serta memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha lokal. Dalam teori growth pole, Perroux (1950) menyatakan bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi membutuhkan jaringan infrastruktur yang kuat agar efek limpahan (*spillover effects*) dapat menyebar ke wilayah sekitarnya. Temuan ini relevan dengan kondisi Tasikmalaya yang berfungsi sebagai simpul distribusi ekonomi regional di Priangan Timur.

Selain infrastruktur fisik, ruang publik ekonomi seperti pasar rakyat, sentra UMKM, dan kawasan ekonomi kreatif memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi berbasis masyarakat. Ruang-ruang ini menciptakan arena interaksi sosial dan ekonomi yang memperkuat modal sosial serta meningkatkan inklusivitas pembangunan. Menurut UN-Habitat (2020), pembangunan perkotaan yang berkelanjutan mensyaratkan tersedianya ruang ekonomi yang inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Transformasi Digital dan Ruang Aliran Ekonomi

Infrastruktur digital muncul sebagai faktor strategis baru dalam pengembangan ekonomi Kota Tasikmalaya. Digitalisasi memungkinkan pelaku UMKM untuk melampaui keterbatasan ruang fisik dan mengakses pasar yang lebih luas melalui e-commerce dan platform daring. Castells (2010) dalam konsep *network society* menjelaskan bahwa teknologi informasi menciptakan *space of flows*, yaitu ruang ekonomi berbasis jaringan yang memungkinkan interaksi lintas wilayah secara cepat dan efisien. Dalam konteks Geografi Pembangunan, infrastruktur digital berpotensi mengurangi ketimpangan spasial dengan membuka akses ekonomi yang lebih setara antara pusat kota dan wilayah pinggiran.

Namun demikian, manfaat digitalisasi tidak akan optimal tanpa dukungan literasi digital dan infrastruktur jaringan yang merata. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan wilayah, bukan sekadar pelengkap pembangunan fisik.

Implikasi Geografi Pembangunan terhadap Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara keseluruhan, temuan penelitian mengonfirmasi bahwa Geografi Pembangunan menyediakan kerangka analitis yang komprehensif dalam memahami dinamika ekonomi Kota Tasikmalaya. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi sektor unggulan berbasis spasial, pemetaan ketimpangan antarwilayah, serta perumusan strategi pembangunan ekonomi berbasis tempat (*place-based development*). Pendekatan berbasis wilayah dinilai lebih efektif dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang kompleks dibandingkan pendekatan sektoral semata (Barca, McCann, & Rodríguez-Pose, 2012).

Implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan perlunya strategi pembangunan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan. Penguatan infrastruktur di wilayah pinggiran, pengembangan kluster UMKM berbasis kawasan, serta peningkatan konektivitas fisik dan digital merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Geografi Pembangunan tidak hanya berperan sebagai alat analisis akademik, tetapi juga sebagai dasar praktis dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Geografi Pembangunan memiliki peran yang sangat strategis dalam memahami, menganalisis, dan mengarahkan pengembangan ekonomi Kota Tasikmalaya secara komprehensif dan berkelanjutan. Geografi Pembangunan tidak hanya memandang pembangunan sebagai proses ekonomi semata, tetapi sebagai fenomena keruangan yang dipengaruhi oleh interaksi antara lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, sumber daya lokal, serta dinamika

sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran yang lebih mendalam terhadap pola pertumbuhan ekonomi kota yang tidak merata secara spasial.

Hasil analisis distribusi spasial aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya cenderung terkonsentrasi di pusat kota dan koridor transportasi utama. Fenomena ini mencerminkan prinsip aglomerasi ekonomi, di mana kedekatan geografis antar-pelaku usaha, konsumen, dan infrastruktur pendukung menciptakan efisiensi produksi, distribusi, dan pertukaran informasi. Pusat kota berfungsi sebagai inti pertumbuhan ekonomi yang dominan, sementara koridor transportasi berperan sebagai sumbu pertumbuhan yang memperluas jangkauan aktivitas ekonomi. Namun, konsentrasi ini juga mengindikasikan adanya ketimpangan spasial, karena wilayah pinggiran kota belum sepenuhnya menikmati manfaat pembangunan akibat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan dukungan kebijakan.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa infrastruktur merupakan elemen kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah apabila direncanakan dengan mempertimbangkan dimensi spasial. Infrastruktur jalan dan transportasi meningkatkan konektivitas dan mobilitas ekonomi, ruang publik ekonomi memperkuat aktivitas UMKM dan ekonomi kreatif, sementara infrastruktur digital membuka peluang pasar yang lebih luas dan melampaui batas geografis konvensional. Dalam perspektif Geografi Pembangunan, infrastruktur berfungsi sebagai *spatial enabler* yang membentuk pola interaksi ekonomi serta menentukan arah dan intensitas pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang tidak merata berpotensi memperlebar kesenjangan antar-kawasan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya inklusif secara spasial. Dominasi pusat kota dan koridor transportasi sebagai kawasan unggulan perlu diimbangi dengan strategi pemerataan pembangunan berbasis wilayah. Pendekatan Geografi Pembangunan memberikan landasan analitis yang kuat untuk mengidentifikasi potensi lokal, mengenali ketimpangan ruang, serta merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Strategi seperti penguatan infrastruktur di wilayah pinggiran, pengembangan kluster UMKM berbasis kawasan, serta peningkatan konektivitas fisik dan digital antar-wilayah menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Kota Tasikmalaya.

Dengan demikian, Geografi Pembangunan terbukti berperan penting sebagai kerangka konseptual dan praktis dalam perencanaan pembangunan ekonomi kota. Pendekatan ini mampu menjembatani kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan, sehingga relevan untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap karakteristik ruang, potensi lokal, dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat Kota Tasikmalaya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun moral, dalam penyusunan penelitian ini. Apresiasi disampaikan kepada para penulis dan peneliti terdahulu yang karyanya menjadi rujukan utama, serta kepada institusi dan pihak terkait yang menyediakan data dan informasi pendukung. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Barca, F., McCann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2012). The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. *Journal of Regional Science*, 52(1), 134–152. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x>
- Capello, R. (2016). *Regional economics* (2nd ed.). Routledge.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Deng, X., Wang, J., & Song, W. (2023). Development geography: Theory, method, and practice. *Geographical Research*, 42(3), 641–654.
- Friedmann, J. (1966). *Regional development policy: A case study of Venezuela*. MIT Press.
- Fujita, M., & Thisse, J. F. (2013). *Economics of agglomeration: Cities, industrial location, and globalization* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. Macmillan.
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.
- Hilal, M. (2023). Infrastruktur perkotaan dan penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 9(2), 115–129.

- Isard, W. (1960). *Methods of regional analysis: An introduction to regional science*. MIT Press.
- Kamilah, N., Prasetyo, A., & Lestari, D. (2023). Studi literatur sebagai metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 5(1), 45–58.
- Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499. <https://doi.org/10.1086/261763>
- Marshall, A. (1890). *Principles of economics*. Macmillan.
- Myrdal, G. (1957). *Economic theory and under-developed regions*. Duckworth.
- OECD. (2019). *OECD regional outlook 2019: Leveraging megatrends for cities and rural areas*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264312838-en>
- Park, R. E., & Burgess, E. W. (1925). *The city*. University of Chicago Press.
- Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pôle de croissance. *Économie Appliquée*, 8(1), 307–320.
- Richardson, H. W. (1973). *Regional growth theory*. Macmillan.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Sartika, D. (2021). Ketimpangan pembangunan wilayah perkotaan di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Geografi dan Pembangunan*, 13(2), 87–101.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Septiani, R. A. D., & Widjojoko. (2022). Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 23–34.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- UN-Habitat. (2020). *World cities report 2020: The value of sustainable urbanization*. United Nations Human Settlements Programme.
- WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). *Our common future*. Oxford University Press.